

JURNAL HUKUM
PENEMPATAN WARIA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA
DALAM LEMBAGA REHABILITASI



Diajukan oleh :

Maria Faustina Beata

NPM : 130511360

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM
PENEMPATAN WARIA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA
DALAM LEMBAGA REHABILITASI



Diajukan oleh :
Maria Faustina Beata

NPM	: 130511360
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 13 Desember 2016

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Dekan,



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PENEMPATAN WARIA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA DALAM LEMBAGA REHABILITASI

Maria Faustina Beata
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
e-mail : mariafaustinabeata@gmail.com

Abstract

A healthy life is a right of every person including transvestites' people (transgender). Generally, transvestites are susceptible to have narcotics problems. People who suffer this disease need to have medical rehabilitation and social rehabilitation. Indonesia submitted to double track system that it put rehabilitation as non penal sanction (treatment). There is a problem on giving the rehabilitation for transvestites : should we place them with men or women? This research aims to find the existence of the positive law that is regulating the placement for transvestites as narcotics addict, to find an information and to analyze the positive law about the placement for transvestites as narcotics addict. The research method of this study is normative method which is focusing on the norms of positive law and literature study. The result of this research is that there is no positive law that is regulating the placement for transvestites as narcotics addict so there is no special treatment for them. The placement for transvestites as narcotics addict is in accordance with the regulation of rehabilitation in general and it has special regulation when it is needed.

Key words : transvestites, narcotics addict, rehabilitation

1. PENDAHULUAN

Hidup sehat merupakan hal yang diupayakan dan dibutuhkan oleh setiap orang. Masyarakat tidak mungkin terlepas dari masalah kesehatan.¹ Kesehatan diartikan sebagai keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.² Dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab atas fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi

masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya.³

Manusia diciptakan pada hakekatnya adalah laki-laki dan perempuan secara citra dengan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Sudah tidak asing lagi dalam masyarakat dikenal kaum waria yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai wanita pria; pria yang bersifat dan bertingkah laku seperti wanita; pria yang mempunyai perasaan sebagai wanita; wadam.⁴ Kaum waria adalah kaum berjenis kelamin laki-laki namun merasa hanya terjebak dalam fisik seorang laki-laki sedangkan secara psikologis merasa dirinya adalah seorang perempuan. Tidak semua waria adalah seorang transeksual karena beberapa diantara mereka tidak mengubah alat kelaminnya menjadi alat kelamin perempuan

¹ Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, hlm 1.

² Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 butir 1, www.ilo.org, diakses 11 September 2016, pukul 10.00 WIB

³ *Ibid*, pasal 15

⁴ <http://kbbi.web.id/waria>, diakses 8 Maret 2016, pukul 14.30 WIB

namun hanya memiliki kecenderungan nyaman menggunakan pakaian dan berdandan seperti perempuan. Dalam istilah agama Islam, kaum ini disebut wadam.

Layaknya manusia pada umumnya yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, waria memiliki hasrat dalam pemuasan dirinya atau mencari pelarian untuk menenangkan kondisi psikologisnya. Waria adalah kaum yang rentan terjerat dalam penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba di kalangan waria bukan merupakan hal yang asing.

Narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.⁵ Orang yang menggunakan narkoba secara terus-menerus disebut sebagai pecandu. Definisi pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis.⁶ Tidak hanya sebagai pecandu, beberapa kaum waria adalah pengedar narkoba. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pengedar dikenal dengan sebutan penyalah guna narkoba karena orang yang menjual narkoba dianggap menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Berbagai alasan orang mengonsumsi narkoba, karena putus cinta, depresi, coba-coba, atau karena diejek tidak macho, tidak keren, tidak gaul dan tidak modern. Benda ini membuat orang kecanduan dan terlena seakan hidup hanya untuk narkoba, seakan sehari tanpa narkoba hidup terasa sepi dan tidak lengkap.⁷ Alasan yang menjadi pintu gerbang

masuknya narkoba pada diri seseorang dapat menjadikan pribadi tersebut sebagai pecandu narkoba. Efek narkoba mengelabui akal sehat orang yang mengonsumsinya. Efek yang kurang baik tersebut mendorong penyalah guna maupun pecandu narkoba wajib mendapat rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Pemberian rehabilitasi diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 menghimbau agar dalam penjatuhan putusan yang berisi mengenai rehabilitasi untuk pecandu narkoba. Setiap pecandu narkoba berada dalam posisi pelaku yang sekaligus menjadi korban yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, termasuk waria yang menjadi pecandu narkoba. Rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan baik oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta. Rehabilitasi medis dilakukan agar pecandu kembali pulih tanpa pengaruh zat sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan dengan tujuan agar pecandu dapat kembali beradaptasi dan memiliki motivasi. Hukum Indonesia menganut *double track system* yang menempatkan sanksi pidana setara dengan sanksi tindakan. Unsur pencelaan atau penderitaan lewat sanksi pidana (penal) sama pentingnya dengan unsur pembinaan dalam sanksi tindakan (non penal).⁸ Rehabilitasi masuk dalam sanksi yang sifatnya non penal yang disebut *treatment*, selain itu rehabilitasi merupakan salah satu usaha pelayanan kesehatan secara optimal untuk memulihkan pecandu narkoba.

Dalam mengeluarkan putusan terhadap waria sebagai pecandu narkoba maupun memberikan rehabilitasi pada waria sebagai pecandu narkoba menjadi sebuah problematika. Jenis kelamin yang diakui hanyalah laki-laki dan perempuan, tidak ada aturan untuk penempatan rehabilitasi terhadap waria akan ditempatkan bersama laki-laki atau perempuan atau terpisah dari keduanya dalam proses pemulihannya. Tidak semua waria melakukan *transeksual* yang mengganti alat

⁵ Soejono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkoba Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 3.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 1 butir 13, <http://bnn.go.id/portal/uploads/perundangan/2009/10/27/uu-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkoba-ok.pdf>, diakses 8 Maret 2016, pukul 15.00 WIB

⁷ Andy Kurniawan, *Bahagia Itu Mudah*, hlm. 94. https://books.google.co.id/books?id=CCP2AwAAQBAJ&pg=PA94&dq=alasan+orang+menggunakan+narkoba&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwivyt23pZPNahWGto8KHVW_CqoQ6AEIJTAC#v=onepage&q=alasan%20orang%20menggunakan%20narkoba&f=false, diakses 8 Maret 2016, pukul 16.00 WIB

⁸ Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

kelaminnya menjadi alat kelamin perempuan, artinya waria tanpa transeksual berjenis kelamin laki-laki namun secara psikologis menganggap dirinya perempuan. Posisi waria ada di tengah-tengah laki-laki dan perempuan. Waria adalah bagian dari masyarakat, statusnya sebagai pecandu narkoba juga berhak mendapat rehabilitasi semaksimal mungkin baik secara fisik maupun psikis. Belum ada aturan hukum yang mengatur secara pasti mengenai penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba. Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan, dirumuskan judul mengenai penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi. Tujuan penelitian adalah mengurai dan mengetahui ada atau tidaknya ketentuan rehabilitasi yang mengatur penempatan terhadap waria sebagai pecandu narkoba serta memperoleh data dan menganalisis mengenai ketentuan penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba. Berdasarkan latar belakang maka dirumuskan permasalahan bagaimanakah seharusnya ketentuan tentang penempatan waria sebagai pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi dan apakah ketentuan rehabilitasi sudah mengatur penempatan terhadap waria sebagai pecandu narkoba?

2. METODE

Jenis penelitian

Jenis hukum merupakan jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba.

a. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba yaitu :

- a) Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 144);
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkoba

(Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 143);

- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba (Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 46);
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah Gunaan, Korban Penyalah Gunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial;
- f) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- g) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder: berupa pendapat hukum dalam literature, *electronic book*, internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa pengertian istilah/ bahasa sehari-hari menurut kamus.

b. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mempelajari sumber hukum primer dan sekunder, serta wawancara dengan narasumber di Lapas Khusus Narkoba kelas IIA Pakem, Badan Narkoba Nasional Provinsi DIY, Lembaga Rehabilitasi : Griya Pemulihan Siloam, dan hakim Pengadilan Negeri Sleman.

c. Analisis Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif / dogmatif yang akan dilakukan yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

a) Deskripsi hukum positif merupakan pemaparan peraturan perundang-undangan mengenai pasal-pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal pemberian penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba.

b) Sistematisasi hukum positif
Sistematisasi dilakukan secara vertikal dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat antinomi antara hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum. Dalam hal ini pemberian rehabilitasi didasarkan pada Undang-undang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, maupun Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Sudah ada sinkronisasi dalam pemberian rehabilitasi untuk dilakukannya rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Terdapat antinomi antara norma hukum positif dengan fakta sosial, jenis

kelamin yang diakui di Indonesia adalah laki-laki dan perempuan namun ada kaum waria/wadam yang statusnya tidak diatur dalam hukum positif.

c) Analisis hukum positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus saling berhubungan. Sifatnya *open system*, dapat digunakan untuk saling mengkaji dan mengevaluasi. Putusan mengenai penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba akan dikaji apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi yang digunakan adalah gramatikal, yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari dan bahasa hukum. Interpretasi sistematis yang mengartikan suatu ketentuan hukum berdasarkan sistem aturan. Interpretasi antisipasi untuk menjawab suatu isu hukum yang berdasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku. Interpretasi teleologi untuk mengetahui makna dari norma-norma yang berlaku.

e) Menilai hukum positif

Dalam hal ini yang dinilai adalah bagaimana penerapan hukum positif mengenai penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba. Menilai bagaimana hukum positif dimodifikasi untuk diterapkan karena adanya antinomi antara norma hukum positif dan fakta sosial mengenai keberadaan kaum waria sebagai bagian dari masyarakat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku termasuk *electronic book* dan informasi yang diakses melalui internet yang dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya. Pendapat hukum juga diperoleh dari wawancara secara terbuka terhadap narasumber :

a) AKBP Siti Alfiah, S.H. sebagai Penyidik Madya Bidang

- Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY
- b) Muhamad Syukron sebagai Kepala Subseksi Bidang Kemasyarakatan Lapas Narkotika kelas II A Pakem
 - c) Esther Budhi, S., A. ks., S.Sos, M.A., M.Th. sebagai pendiri lembaga rehabilitasi Griya Pemulihan Siloam
 - d) Muhamad Baginda R. Harahap, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sleman.
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diperbandingkan untuk dicari kesenjangannya. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada.
- d. Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah deduktif. Diawali dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum yang dimaksud adalah mengenai isi peraturan perundang-undangan yang mengatur penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba dan kesimpulan khusus berupa hasil penelitian dari penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba yang sudah pernah terjadi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Waria merupakan bagian dari masyarakat yang dikenal dengan berbagai sebutan seperti banci, bencong, wandu, wadam. Dapat diperkirakan, tidak ada yang tidak pernah bersua dengan kaum waria, namun seringkali pandangan mengenai waria dibingkai oleh stereotip yang negatif, keengganan mengakui, serta keinginan untuk menolak atau mengabaikan mereka. Tidak dapat dipungkiri, waria tetap bagian dari masyarakat yang rentan menjadi pecandu narkoba dan sudah seharusnya mendapat fasilitas rehabilitasi selayaknya pecandu narkoba pada umumnya.

Bagi pecandu narkoba yang sudah menjalani proses hukum dan asesmennya dikabulkan oleh hakim, akan menjalani rehabilitasi di tempat yang disebutkan dalam putusan. Menanggapi fenomena adanya waria,

Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Muhamad Baginda R. Harahap, S.H. berpendapat bahwa secara umum hakim akan menentukan penempatan berdasarkan fakta jenis kelamin, tidak hanya mengacu pada KTP dikarenakan banyak yang secara fisik adalah seorang laki-laki namun memiliki KTP dengan identitas perempuan. Hakim berpendapat, pengecekan jenis kelamin secara *real* diserahkan sepenuhnya pada kepolisian dan kejaksaan. Putusan hakim akan menyebutkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Keberadaan waria yang statusnya sebagai pecandu narkoba tidak menjadi masalah apabila tidak terjadi pelampiasan seksual di dalam lapas, hal ini disampaikan Muhamad Syukron sebagai Kepala Subseksi Bidang Kemasyarakatan Lapas Narkotika kelas II A Pakem. Kecenderungan yang terjadi, kebanyakan waria yang terlahir dengan kelamin laki-laki dan dengan identitas gender perempuan tertarik secara seksual kepada laki-laki.⁹ Satu kamar yang disediakan di lapas diisi dengan jumlah ganjil sebanyak 3 atau 5 orang. Selama ini, Lapas Narkotika kelas II A Pakem belum pernah menerima tahanan maupun narapidana seorang waria yang berpenampilan selayaknya perempuan, hanya pernah ada pecandu berjenis kelamin laki-laki yang berperawakan gemulai atau *ngondek* dan memang diketahui pekerjaannya sebagai pegawai salon (*capster* lekong)¹⁰ yang dapat digolongkan sebagai waria *opportunities*. Penghuni lain tidak ada yang memperlakukan hal tersebut karena tidak mengganggu dan dapat menjalani kehidupan sebagai laki-laki secara normal saat berada di lapas bahkan sering melakukan pekerjaannya sebagai tukang salon dan memotong rambut para pegawai lapas. Selama tidak ada penyimpangan seksual dan penghuni lain tidak merasa terganggu atau jijik dengan adanya waria *opportunities* maupun homoseksual, tidak akan ada pemisahan tempat maupun perlakuan yang istimewa, namun jika ke depannya terjadi kejanggalan atau permasalahan serius dalam berkaitan dengan adanya waria, apalagi sampai terjadi kegiatan prostitusi sesama jenis di dalam lapas karena

⁹ Hartoyo dan rekan, 2014, *Sesuai Kata Hati : Kisah Perjuangan 7 Waria*, Rehal Pustaka, Jakarta, hlm.55

¹⁰ Sebutan untuk pegawai salon berjenis kelamin laki-laki yang berperilaku seperti perempuan

adanya waria yang *nyebong*¹¹ dipastikan akan diberlakukan pengecualian seperti pemisahan ruang atau diberikan *treatment* penyadaran khusus.

Menurut data dari Griya Pemulihan Siloam yang merehabilitasi 13 orang waria pecandu narkoba, yang menyebabkan waria menjadi pecandu narkoba adalah tingkat stress yang tinggi berkaitan dengan identitas dirinya sendiri maupun penerimaan masyarakat. Berkaitan dengan penerimaan masyarakat, para waria kesulitan terutama dalam hal pekerjaan dan pemenuhan ekonomi. Tingkat stress yang tinggi membuat banyak yang mengalihkan pada obat. Rata-rata narkoba yang digunakan oleh waria adalah ganja dan inhalansia yang memberikan efek *suggest*. Inhalansia sendiri adalah zat beracun yang mencakup berbagai macam pembersih, herbisida, pestisida, bensin, minyak tanah, beberapa bentuk lem, thinner cat dan bahan kimia yang digunakan dalam spidol, ketika dihirup banyak bahan kimia dalam senyawa ini yang dapat mengubah cara fungsi otak bagi orang yang menggunakannya, mungkin dapat menyebabkan perasaan euphoria dan halusinasi visual.¹²

Waria lebih rentan terkena virus HIV/AIDS, sehingga lebih banyak yang menyorot waria sebagai penderita HIV/AIDS daripada pecandu narkoba. Keberadaan waria pecandu narkoba juga tidak sebanyak penderita HIV/AIDS, hal ini didasarkan pada observasi pada lembaga-lembaga yang menjadi payung dan pemerhati waria. Rata-rata seorang waria yang menjadi pecandu narkoba bukan merupakan pecandu murni namun juga mengalami *dual diagnosis* HIV/AIDS. Waria yang direhabilitasi di Griya Pemulihan Siloam sudah menjalani wajib lapor dan menjalani rawat jalan. Dijelaskan oleh Esther Budhi, S., A. ks., S.Sos, M.A., M.Th., sebagai pendiri Griya Rehabilitasi Siloam, rata-rata waria yang menjalani rehabilitasi adalah waria yang *nyebong*.¹³ Belum ada waria yang menjalani rawat inap dikarenakan belum memiliki tempat khusus untuk waria. Rehabilitasi rawat

jalan jalan yang dilakukan waria meliputi pemeriksaan rutin oleh tim dokter khusus yang bekerjasama dengan Griya Pemulihan Siloam seperti pemeriksaan tekanan darah maupun kesehatan secara umum. Selain itu, diadakan pemeriksaan darah, kolesterol, asam urat, serta cek urin untuk memantau pemakaian narkoba.

Pemberian rehabilitasi juga dapat dikategorikan sebagai pemberian vonis (hukuman) dikarenakan hukum Indonesia menganut *double track system* yang menempatkan sanksi pidana setara dengan sanksi tindakan. Unsur pencelaan atau penderitaan lewat sanksi pidana sama pentingnya dengan unsur pembinaan dalam sanksi tindakan.¹⁴ Selain sebagai usaha pelayanan kesehatan, rehabilitasi termasuk dalam sanksi pembinaan.

Pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang dicantumkan dalam putusan harus diberikan secara teliti dan cermat. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Muhamad Baginda R. Harahap, S.H. menjelaskan bahwa pemberian rehabilitasi yang dicantumkan dalam putusan ditentukan dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan karena pemberian rehabilitasi adalah sebuah asesmen atau rekomendasi. Rehabilitasi diberikan melalui proses asesmen yang dapat diajukan oleh kepolisian (dalam hal ini penyidik) atau Kejaksaan dengan tembusan kepada kepala Badan Narkotika Nasional sesuai tempat kejadian perkara untuk mendapat rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu yang beranggotakan Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Badan Narkotika Nasional.

Tim Dokter Asesmen Terpadu melakukan analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi.¹⁵ Pemeriksaan meliputi wawancara mengenai riwayat kesehatan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatri,

¹¹ Istilah prostitusi pada waria.

¹² Penyalahgunaan dan Ketergantungan Inhalansia, <http://bnnprovsumsel.com/index.php/k2/artikel-opini/item/164-penyalahgunaan-dan-ketergantungan-inhalansia/164-penyalahgunaan-dan-ketergantungan-inhalansia>, diakses 11 Oktober 2016 pukul 1.02 WIB

¹³ Istilah prostitusi pada waria.

¹⁴ Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

¹⁵ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014, Pasal 12 ayat 1 butir a, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560211ea73636/tata-cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkoba>, diakses 30 September 2016, pukul 14.42 WIB

riwayat keluarga, observasi perilaku, pemeriksaan fisik dan psikis.¹⁶ Selain asesmen oleh Tim Dokter, dilakukan asesmen oleh Tim Hukum untuk menganalisis keterlibatan orang yang ditangkap atau tertangkap tangan dalam kaitan dengan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan Narkoba.¹⁷ Asesmen yang dilakukan oleh Tim Hukum meliputi pencocokan identitas tersangka dengan *database* BNN atau Polri, analisis intelejen terkait (jika ada), riwayat keterlibatan tindak kriminalitas, menelaah berita acara pemeriksaan, dan menelaah penerapan dengan peraturan hukum yang terkait.¹⁸ Seluruh prosedur asesmen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun

2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan / atau Terdakwa pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009, dilampirkan batas jumlah maksimum narkoba yang ditemukan agar pecandu narkoba dapat menjalani rehabilitasi. Gramatur narkoba dalam SEMA ini diasumsikan sebagai dosis harian penggunaan narkoba.¹⁹ Hakim Pengadilan Negeri Sleman, hakim akan mencocokkan keselarasan antara asesmen dengan pemeriksaan bukti maupun saksi dalam persidangan. Hakim akan mengabulkan pemberian rehabilitasi apabila memenuhi syarat, namun apabila dalam persidangan ditemukan fakta-fakta baru misalnya terdakwa mengonsumsi narkoba melebihi batas maksimum yang tercantum dalam SEMA, ada perbedaan jenis narkoba yang dikonsumsi dalam asesmen dengan barang bukti, menurut keterangan saksi terdakwa bukan hanya pecandu namun juga pengedar atau bandar, atau ternyata terdakwa merupakan residivis, maka hakim tidak mengabulkan asesmen untuk dilakukan rehabilitasi.

Gramatur Batas Maksimal Barang Bukti Penggunaan Narkoba Dosis Pemakaian Satu Hari

Jenis	Dosis
Kelompok Methamphetamine (Shabu)	1 gram
Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram = 8 butir
Kelompok Heroin	1,8 gram
Kelompok Kokain	1,8 gram
Kelompok Ganja	5 gram
Daun Koka	5 gram
Meskalin	5 gram
Kelompok Psilosybin	3 gram
Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
Kelompok Fentanil	1 gram
Kelompok Metadon	0,5 gram
Kelompok Morfin	1,8 gram
Kelompok Petidin	0,96 gram
Kelompok Kodein	72 gram
Kelompok	32

¹⁶ *Ibid*, Pasal 15 ayat 1

¹⁷ *Ibid*, Pasal 12 ayat 1 butir b

¹⁸ *Ibid*, Pasal 16 ayat 1

¹⁹ Albert Wirya dan rekan, 2016, *Di Ujung Palu Hakim : Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek tahun 2014*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, hlm. 3

Bufrenorfin	mg
-------------	----

Sumber SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009.

Undang-undang Narkotika yang terbaru mewajibkan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika yang bertujuan agar para pecandu yang melakukan wajib lapor mendapat pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi. Definisi wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan atau orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²⁰ Memberikan fasilitas bagi wajib lapor pecandu narkotika maka dibuat Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yaitu pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi social yang ditunjuk pemerintah.²¹ Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan rehabilitasi pada para pecandu yang sudah melaporkan diri kemudian melakukan asesmen berupa wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik / pskisis terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi secara keseluruhan.²² Institusi Penerima Wajib Lapor melakukan rangkaian pengobatan atau perawatan guna kepentingan pemulihan pecandu narkotika.²³ Penyelenggara program rehabilitasi akan melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dan perubahan perilaku pecandu yang sudah melakukan wajib lapor.²⁴

Ketentuan rehabilitasi yang dimuat dalam Undang-undang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, Peraturan Kepala Badan Narkotika

Nasional Nomor 11 Tahun 2014, maupun Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, tidak ada yang mengatur mengenai penempatan rehabilitasi berdasarkan jenis kelamin. Secara spesifik, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pecandu berjenis kelamin laki-laki harus diberikan rehabilitasi yang lebih spesifik dari pecandu berjenis kelamin perempuan, begitu pula sebaliknya. Tidak ada ketentuan tertulis pemisahan rehabilitasi menurut jenis kelamin, semua berfokus pada statusnya sebagai pecandu dan perbedaan yang diberikan sesuai dengan kondisi atau kadar kecanduan serta statusnya sebagai pecandu yang sekaligus sebagai narapidana atau pecandu wajib lapor.

Beberapa tempat rehabilitasi untuk pecandu narkotika yang dikuatkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta :

- 1) Lembaga Rehabilitasi Institusi Pemerintah
 - a) IPWL Kesehatan
 - (1) RSUP Dr. Sardjito
 - (2) RSJ Grhasia
 - (3) RSUD Kota Yogyakarta
 - (4) RS Bhayangkara POLDA DIY
 - (5) Puskesmas Gedong Tengen
 - (6) Puskesmas Umbulharjo I
 - (7) Puskesmas Banguntapan II
 - (8) Poliklinik Biddokes POLDA DIY
 - b) IPWL Sosial
 - Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putra Kalasan Sleman DIY
 - c) Institusi Pemerintah yang bekerjasama dengan BNNP DIY Non IPWL
 - (1) Klinik Seger Waras BNNP DIY
 - (2) RSUD Sleman
 - (3) RSUD Prambanan
 - (4) Puskesmas Depok III

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika, Pasal 1 butir 1, <http://bali.bnn.go.id/perundang-undangan/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-25-tahun-2011-tentang-pelaksanaan-wajib-lapor-pecandu-narkotika/>, diakses 3 Oktober 2016 pukul 10.55 WIB

²¹ *Ibid*, pasal 1 butir 2

²² *Ibid*, pasal 7-8

²³ *Ibid*, pasal 11 ayat 1

²⁴ *Ibid*, pasal 16

- (5) Puskesmas Prambanan
- (6) RSUD Panembahan Senopati Bantul
- (7) RSUD Wonosari
- (8) RSUD Wates
- (9) Puskesmas Ponjong II Gunung Kidul
- (10) Puskesmas Sewon I Bantul
- (11) Puskesmas Temon I Kulon Progo
- (12) Puskesmas Tegalrejo
- d) Institusi Pemerintah yang difungsikan sebagai Lembaga Rehabilitasi Lapas Narkotika Kelas II A Pakem, Sleman, DIY
- 2) Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
 - a) IPWL Sosial
 - (1) Pondok Pesantren Al-Islamy
 - (2) Yayasan Rehabilitasi Kunci
 - (3) Yayasan Indo Charis
 - (4) Yayasan Griya Pemulihan Siloam
 - (5) Panti Rehabilitasi Pondok Tetirah Dzikir
 - (6) Rehabilitasi Galilea Elkana
 - (7) Yayasan Girlan Nusantara
 - b) Rehabilitasi Medis Non IPWL
 - (1) RS PKU Wonosari
 - (2) RS Queen Latifa
 - (3) RS Condong Catur
 - (4) RS Griya Mahardika Bantul
 - (5) RS Puri Nirmala Yogyakarta
 - (6) Klinik Pratama Widuri
 - (7) RSU Bethesda Lempuyangwangi
 - c) Rehabilitasi Sosial Non IPWL
 - (1) Hafara Bantul
 - (2) Ponpes Nurul Haromain
 - (3) Bidayatussalikin
 - (4) Victory Plus²⁵

Semua tempat rehabilitasi tersebut bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelenggarakan rehabilitasi medis maupun sosial bagi pecandu yang wajib lapor maupun yang sudah diproses secara hukum. Setiap tempat dapat menjadi rujukan untuk rehabilitasi tergantung dari kebutuhan rehabilitasi tiap pecandu

diperhatikan dari hasil asesmen yang menyatakan pecandu tersebut adalah pecandu murni atau mengalami *dual* diagnosis. Rehabilitasi yang disediakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih berfokus pada pecandu murni, maka untuk menjadi rujukan, banyak lembaga rehabilitasi yang dikuatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik statusnya sebagai IPWL maupun non IPWL.

Penempatan pecandu narkotika yang sudah melalui proses hukum, menurut Muhammad Syukron, pecandu akan ditempatkan di lapas yang sesuai dalam petikan putusan. Apabila petikan putusan menyatakan pecandu tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka untuk kasus yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pasti ditempatkan di Lapas Narkotika kelas II A Pakem. Hal serupa juga berlaku jika dalam petikan putusan dinyatakan asesmen rehabilitasi dikabulkan juga akan dicantumkan untuk menjalani program rehabilitasi di Lapas Narkotika kelas II A Pakem. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga menempatkan pecandu narkotika berdasarkan fakta yang ada. Menurut Muhammad Baginda R. Harahap, S.H., hakim mencantumkan jenis kelamin mengacu pada fakta yang ada. Tidak hanya melalui jenis kelamin dalam KTP, pengecekan sudah dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan apakah betul-betul berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Muhammad Baginda R. Harahap, S.H. berpendapat bahwa sekarang banyak muncul fenomena laki-laki berpenampilan perempuan dan perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Apabila yang dijatuhi putusan adalah seorang transeksual sejauh sudah ada penetapan pengadilan secara formal, maka ditempatkan sesuai jenis kelamin yang telah disahkan tersebut. Contohnya apabila seorang laki-laki yang berganti kelamin menjadi perempuan dan sudah ada penetapan pengadilan sebelumnya, maka sebagai hakim, Muhammad Baginda R. Harahap, S.H., akan mengikuti fakta yang ada dan menyebutkan dalam identitas bahwa jenis kelamin perempuan dan otomatis akan ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan untuk perempuan walaupun orang tersebut merupakan perempuan hasil transeksual.

Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

²⁵ Data dari BNNP DIY, diperoleh pada tanggal 5 Oktober 2016

penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba. Semua peraturan perundang-undangan tidak memfokuskan pada perbedaan *treatment* rehabilitasi menurut jenis kelamin terutama keberadaan waria sebagai fenomena yang menjadi bagian masyarakat, namun pada dasarnya semua pecandu diberi rehabilitasi untuk penyembuhan sesuai dengan kondisi dan keperluan pengobatannya.

Bukan mendukung adanya kaum waria sebagai gender ketiga, namun penulis merasa perlu adanya pemerhati untuk penempatan rehabilitasi untuk pecandu narkoba khusus waria. Dibandingkan dengan rehabilitasi untuk pecandu yang memiliki jenis kelamin *legal*, rehabilitasi terhadap waria yang sifatnya *transvestite* masih serba minim di bidang apapun. Banyak lembaga yang mengurus HIV/AIDS dibidang waria, karena memang mayoritas penyakit yang diderita waria adalah HIV/AIDS dan ditakutkan adanya penularan, karena tidak dapat dipungkiri sebagian masyarakat menerima waria dalam batas tertentu yakni sebagai pelawak, pegawai salon kecantikan, bahkan pelacur.²⁶ Demi keperluan kesembuhan, keberadaan waria juga harus diperhitungkan. Menurut hemat penulis, apabila diperlukan, jika ada waria yang menjalani rehabilitasi juga diberikan *treatment* atau *skill* tertentu. Penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba, menurut hemat penulis, perlu dibedakan maupun tetap dijadikan satu sesuai jenis kelamin yang *real* dapat dijadikan kebijakan yang fleksibel. Semua kebijakan harus didasarkan adakah alasan yang menguatkan. Jenis waria juga mempengaruhi, apabila memang jenis waria yang berpenampilan sangat feminis dan memiliki kelainan orientasi seksual lebih baik dipisahkan dan diberikan *treatment* khusus, apalagi yang memiliki keseharian bekerja sebagai pekerja seks, bisa memberi pengaruh jika menjajakan diri, mengganggu, maupun menjadi olokan bagi sesama pecandu yang direhabilitasi bersama. Bagi waria yang masih menerima dan menyadari kodratnya sebagai seorang laki-laki dan secara fisik total masih laki-laki, tidak menjadi masalah jika digabung dengan pecandu berjenis kelamin laki-laki, selama eksistensinya sebagai waria diterima dan tidak

menjadi bahan olok-olokan semata yang dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian berkaitan dengan penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba, dapat disimpulkan :

1. Ketentuan rehabilitasi dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Gunaan, Korban Penyalah Gunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan ketentuan yang dirangkum dalam Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi belum mengatur penempatan rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba. Tidak ada peraturan perundang-undangan maupun ketentuan rehabilitasi yang spesifik mengatur penempatan pecandu narkoba berdasarkan jenis kelamin tetapi yang ada aturan mengenai pemberian rehabilitasi melalui putusan hakim (bagi yang telah mengalami proses hukum) atau melalui Institusi Penerima Wajib Laport (bagi yang telah menjalani wajib laport).
2. Pemberian rehabilitasi terhadap waria sebagai pecandu narkoba dijalankan sesuai dengan ketentuan rehabilitasi pada umumnya dan diberikan kebijakan khusus apabila diperlukan. Belum ada sarana khusus sebagai tempat bagi waria. Bagi waria pecandu narkoba yang telah menjalani proses hukum, ditempatkan sesuai fakta jenis kelamin. Bagi waria pecandu narkoba wajib laport, hanya diberikan rehabilitasi rawat jalan sebagai kebijakan khusus mengingat rata-rata waria mengalami *dual diagnosis* dengan HIV/AIDS.

²⁶ *Ibid*, hlm. 103.

5. REFERENSI

Buku :

Albert Wirya dan rekan, 2016, *Di Ujung Palu Hakim : Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek tahun 2014*, Lembaga Bantuak Hukum Masyarakat, Jakarta

Hartoyo dan rekan, 2014, *Sesuai Kata Hati : Kisah Perjuangan 7 Waria*, Rehal Pustaka, Jakarta

Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soejono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung

Soerjono Soekanto, 1989, *Aspek Hukum Kesehatan*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, hlm 1.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Website :

Andy Kurniawan, *Bahagia Itu Mudah*, https://books.google.co.id/books?id=CCP2AwAAQBAJ&pg=PA94&dq=alasan+orang+menggunakan+narkotika&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwivyt23pZPNAhWGto8KHVW_CqoQ6AEIJTAC#v=onepage&q=alasan%20orang%20menggunakan%20narkotika&f=false

<http://kbbi.web.id/waria>

Penyalahgunaan dan Ketergantungan Inhalansia,

<http://bnnprovsulsel.com/index.php/k2/artikel-opini/item/164-penyalahgunaan-dan-ketergantungan-inhalansia/164-penyalahgunaan-dan-ketergantungan-inhalansia>

Lain-lain :

Data dari BNNP DIY, diperoleh pada tanggal 5 Oktober 2016